

BAB I PENGANTAR

1.1. Latar Belakang Penelitian

1.1.1. Dampak Urbanisasi

Pada dasa warsa terakhir, studi tentang struktur sosial, politik perkotaan serta urbanisasi di Asia Tenggara telah banyak dilakukan. Teori yang didapatkan merupakan hasil penelitian mengenai kota dan urbanisasi di negara-negara Barat dan hasil tersebut diterapkan pada kota-kota Asia Tenggara (Evers, 1995:49):

“Urbanisasi merupakan salah satu proses yang tercepat di antara perubahan-perubahan sosial di seluruh dunia. Urbanisasi, pertama merujuk pada keadaan persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dalam suatu negara. Kedua merujuk pada suatu proses yaitu peningkatan jumlah penduduk kota.”

Perkembangan penduduk di Indonesia meningkat pesat dari tahun 60-an sampai dengan tahun 90-an. Semakin besar tingkat pertumbuhan dan proporsi penduduk kota, maka jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan semakin tinggi. Di Indonesia, pada tahun 90-an, angka

pertumbuhan penduduk kota 5,57%, lebih tinggi dari angka pertumbuhan penduduk secara nasional yang hanya 2,16% (Nurmandi, 1999). Proporsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dibandingkan dengan yang non-perkotaan, disebut sebagai *level urbanisasi* .

Economic Social Council for Asia Pasific (ESCAP) mencatat level urbanisasi di Indonesia seperti yang terlihat pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Level Urbanisasi di Indonesia

Tahun	1960	1970	1980	1990
Persentase	15%	17%	22%	31%

Sumber: ESCAP,1993 (dalam Nurmandi, 1999)

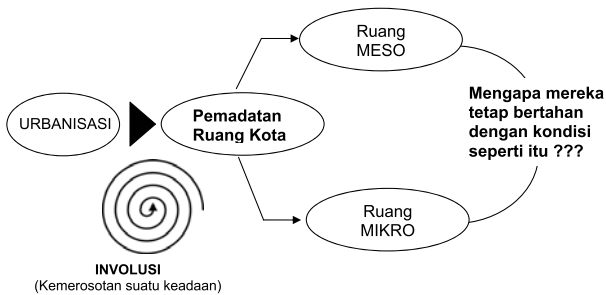
Economic Social Council for Asia Pasific (ESCAP), mencatat level urbanisasi dari tahun 60-an sampai tahun 90-an di Indonesia meningkat dari 15% pada tahun 60-an menjadi 31% pada tahun 90-an (ESCAP, 1993 dalam Nurmandi, 1995). Komponen peningkatan alamiah penduduk kota menurun drastis dari 68% pada dekade 60-an dibandingkan dekade 2000-an yang hanya 36,7%. Sebaliknya migrasi dan reklasifikasi (perubahan status wilayah dari desa menjadi kota) mengalami peningkatan drastis, dari 32% pada dekade 60-an menjadi 63,3% pada dekade 2000-an, lihat (Tabel 2).

Tabel 2. Komponen-Komponen Penyumbang Pertumbuhan Penduduk Kota

Komponen	1961-1971	1971-1980	1980-1985	1990-1995	2000-2005
Peningkatan alamiah dari penduduk kota	68%	48%	35,2%	37%	36,7%
Migrasi dan Reklasifikasi	32%	52%	64,8%	63%	63,3%

Sumber: Andrew W.Hammer, *Indonesian The Challenge of Urbanization The World Bank Paper*, 1985 dan Escap, 1993

Indikator pada Tabel 2 menunjukkan bahwa urbanisasi merupakan faktor penyebab terjadinya pertumbuhan penduduk kota. Angka tersebut memperlihatkan bahwa terjadi 'involusi kota' (kemerosotan suatu keadaan kota) di kota-kota besar Indonesia (Gambar 1). Implikasinya terlihat pada padatnya hunian dalam kota, terutama pada pusat perdagangan dengan berbagai karakteristik permasalahannya. Fenomena ini selalu terlihat pada kota-kota besar terutama di dunia ketiga dengan adanya daya tarik pusat kota, terkait terhadap pesatnya perputaran roda ekonomi yang membawa dampak derasnya arus pendatang memadati pusat kota. Permasalahan ini tidak diimbangi dengan penyediaan permukiman yang layak oleh pemerintah kota, sehingga masyarakat miskin kota mencari solusi sendiri dalam melakukan penyediaan tempat tinggalnya.



Gambar 1. Skema Pemadatan Ruang Kota

Sumber: Peneliti (2002), modifikasi Sudaryono (2002)

1.1.2. Permukiman Kampung Kota

Permukiman padat di sekitar pusat kota, atau lebih dikenal dengan sebutan 'kampung kota', biasanya masih mempunyai gaya hidup pedesaan dengan mempertahankan pola kehidupan tradisional. Kota-kota lama tumbuh dari kampung, dan bukan sebaliknya. Pola perilaku, kesenian, nilai-nilai moral, cinta kasih kepada sesama, rasa setia kawan, gotong royong, semua merupakan hasil olahan kehidupan kampung selama berabad-abad (Khudori, 2002).

Penduduk kampung ini rata-rata berpenghasilan rendah serta status sosial dan pendidikannya juga rendah. Sebagai akibat derasnya arus pendatang, serta belum siapnya pemerintah kota memberikan pelayanan yang memadai, maka kondisi fisik kampung kota pada umumnya berkualitas rendah. Lingkungan permukiman sangat padat, tata letak rumah tidak teratur tumbuh dan berkembang tanpa rencana. Dengan tegas Khudori (2002: 135) menyatakan bahwa:

“Dengan demikian masalah permukiman di perkotaan merupakan potensi konflik sosial, ekonomi, dan politik. Apakah potensi itu akan menjadi kenyataan atau tidak, tergantung kepada tindakan pemerintah. Kalau pemerintah menerima kehadiran kaum miskin kota, tindakannya akan berupa ‘perbaikan’ (improvement). Kalau pemerintah ragu-ragu atau tidak tahu mesti berbuat apa, tindakannya akan berupa ‘pembiaran’ (neglection). Kalau pemerintah mengutamakan kepentingan ekonomi, tindakannya akan berupa ‘pemindahan’ (relocation) atau ‘penggusuran’ (eviction).”

Mc Gee (1971) dalam Effendi 1995: 165 menyatakan bahwa munculnya masalah sosial dan kantong-kantong permukiman miskin di kota, sebagai akibat urbanisasi semu (*pseudo urbanization*), di mana proses urbanisasi di negara sedang berkembang tidak sejalan dengan perkembangan ekonomi (industrialisasi).

Kota Yogyakarta mengalami hal serupa dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Peningkatan penduduk kota yang tinggal di perkotaan (daerah Bantul dan Sleman), secara proporsional mencapai masing-masing 50,28% dan 35,48% selama lebih kurang sepuluh tahun ini (Firman, dalam Nurmandi 1999: 12). Tingkat pertumbuhan ini cukup cepat dibandingkan daerah lain di Indonesia. Pembangunan yang cepat di Yogyakarta ini telah menyebabkan perkembangan fisik kota yang tidak teratur. Bila dilihat dari tingkat kepadatannya, Kota Yogyakarta cukup padat dengan 12.080 jiwa/km², dibandingkan dengan kabupaten di sekitarnya seperti Bantul 1.597 jiwa/km² dan Sleman 1.637 jiwa/km² (BPS DI Yogyakarta, 2002: 3).

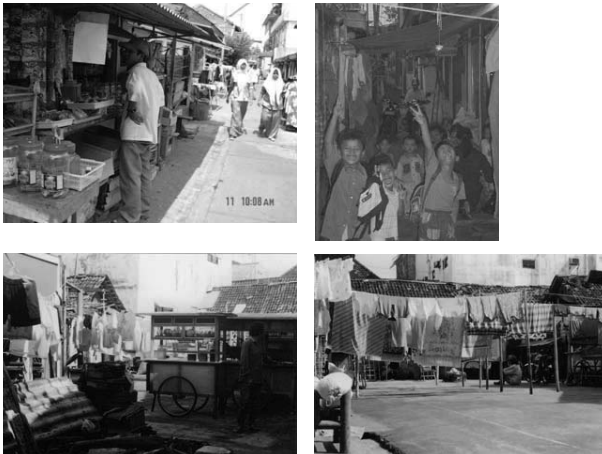
Permukiman padat di sekitar kawasan Malioboro yang terletak di pusat Kota Yogyakarta juga menghadapi

permasalahan seperti tersebut di atas. Perkembangan perdagangan dan pariwisata yang pesat di kawasan ini, mengakibatkan tumbuhnya toko dan hotel di sepanjang Jalan Malioboro. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima (PKL) yang semakin memadati kedua sisi Jalan Malioboro. Pedagang kaki lima di Jalan Malioboro mempunyai daya tarik tersendiri bagi wisatawan baik dari luar negeri maupun domestic. Hal ini tentu saja memberi peluang bagi pedagang luar kota, seperti dari Wonosari, Madura, Palembang, Lampung, Jambi, Riau, dan Minangkabau untuk ikut mengadu nasib sebagai PKL di kawasan ini. Aktivitas tersebut berpengaruh terhadap penyediaan tempat tinggal bagi para pedagang dan karyawan yang bekerja di Jalan Malioboro dan sekitarnya. Penduduk kampung di sekitar kawasan Malioboro merespons kondisi tersebut dengan menyediakan sebagian ruang tinggalnya untuk disewakan/dikontrakkan (Rekaman lapangan Oktober, 2001).

Fenomena rumah sewa/kontrakan yang padat, terlihat pada Kampung Pajeksan dan Jogonegaran di Kelurahan Sosromenduran, bila dibandingkan dengan permukiman kampung lainnya di belakang Jalan Malioboro. Hampir kurang lebih 80% rumah tinggal yang ada, pada Kampung Pajeksan dan Jogonegaran, disewakan untuk pedagang maupun pegawai yang bekerja di Jalan Malioboro (Rekaman lapangan, Oktober, 2001). Dibandingkan kawasan permukiman lainnya di sekitar Malioboro, kedua kampung ini berkembang menjadi daerah pendukung utama dalam hal penyediaan tempat tinggal bagi pedagang dan karyawan yang bekerja di Jalan Malioboro. Penduduk menyediakan sebagian dari rumahnya untuk disewakan/

dikontrakkan meskipun ruang tinggalnya sangat terbatas. Penyewa/pengontrak selain suku Jawa juga terdapat suku Madura, Palembang, Jambi, Riau, dan Minangkabau. Toleransi penggunaan ruang secara bersama dalam rumah tinggal penduduk sangat mewarnai Kampung Pajeksan dan Jogonegaran (Rekaman lapangan, Oktober, 2001).

Dengan segala keterbatasan yang ada, penduduk berusaha memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal bagi pedagang kaki lima dan karyawan tersebut. Dalam kondisi terbatas dan minim, cara pengontrak berusaha beradaptasi dengan menyiasati ruang tinggalnya, sangat menarik untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut agar dapat dipahami fenomenanya (beberapa fenomenanya terlihat di Gambar 2)



Gambar 2. Suasana Permukiman Kampung Pajeksan dan Jogonegaran

Sumber: Rekaman Lapangan, Oktober 2001

1.2. Konteks Penelitian

1.2.1. Pertanyaan Penelitian

Penggalian pertanyaan penelitian dilakukan setelah melalui proses pemahaman fenomena pada latar penelitian. Penelitian pada permukiman padat yang dilakukan selama ini belum sampai menyentuh permasalahan yang menyangkut tentang keruangan dan aktivitas penghuninya secara holistik (fisik dan nonfisik). Penelitian pada permukiman padat di perkotaan, sering kali hanya mengupas permasalahan di permukaan saja, seperti kondisi fisik rumah, minimnya sarana prasarana lingkungan permukiman, dan sebagainya.

Penelitian tentang toleransi keruangan pada permukiman padat sangat membuka peluang untuk menemukan teori-teori baru setelah memahami fenomena empiris yang ada, melalui pemikiran (sistem nilai) masyarakatnya. Pemahaman tentang bagaimana melakukan toleransi dan kemudian menyiasati ruang, untuk tetap tinggal pada lahan dan ruang yang terbatas di kampung Pajeksan dan Jogonegaran, menarik untuk dilakukan.

Dalam melakukan proses penelitian kualitatif naturalistik pendekatan fenomenologi, di mana mengkaji fenomena lapangan untuk menggali makna di balik empiri sensual dalam menemukan permasalahan menjadi sangat penting. Landasan teoretik tidak lagi merupakan landasan untuk melakukan proses penelitian (hanya merupakan *background knowledge*).

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, pertanyaan besar yang perlu dicari jawabnya adalah:

“Mengapa penduduk kawasan Kampung Pajeksan dan Jogonegaran, tetap bertahan tinggal dengan kondisi rumah yang padat, sempit karena luas rumah terbatas, dan penghuninya banyak?”

Pertanyaan besar tersebut di atas, secara lebih rinci dapat diuraikan menjadi 4 (empat) subpertanyaan berikut ini:

1. Adakah nilai-nilai yang mendasar, sehingga mereka masih tetap bertahan tinggal pada kondisi apa adanya di Kampung Pajeksan dan Jogonegaran?
2. Bagaimana penduduk Kampung Pajeksan dan Jogonegaran melakukan penyiasatan ruang dengan elemen terbatas pada ruang tinggal dengan luasan yang minim?
3. Apakah toleransi keruangan yang dilakukan pengontrak di dalam rumah juga meluas/ekspansi ke daerah publik (ruang kampung)?
4. Berapa ambang batas dari toleransi keruangan dan bagaimana wujud dari ruang-ruang yang fleksibel dan ruang-ruang yang rigid pada ruang tinggal di rumah kontrakan?

1.2.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Permukiman padat di pusat kota mempunyai karakteristik tersendiri dengan berbagai masalah antara lain kondisi lingkungan fisik, sosial budaya, sosial-ekonomi serta karakteristik penduduknya. Secara ekonomi, penduduk permukiman padat kota mempunyai potensi

sebagai pendukung ekonomi perkotaan, terutama dari sisi ekonomi informal. Pembangunan yang berlangsung cepat di Kota Yogyakarta terutama terlihat pada kawasan Malioboro, khususnya perkembangan perdagangan dan pariwisata. Hal ini tentu saja memberi peluang bagi pedagang dalam dan luar kota untuk datang dan mengadu nasib di kawasan Malioboro. Aktivitas tersebut memberi pengaruh dalam penyediaan rumah tinggal bagi pedagang dan karyawan yang bekerja di kawasan Malioboro. Rumah yang diinginkan tentu saja disesuaikan dengan kemampuan mereka untuk menyewa rumah penduduk di sekitar kawasan Malioboro. Penduduk berusaha untuk menyalakan kebutuhan ruang tinggalnya yang terbatas, agar dapat memenuhi kebutuhan pedagang dan karyawan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk: mendapatkan pengetahuan lokal yang memberi gambaran secara idiografis mengenai toleransi keruangan yang dilakukan pengontrak dalam permukiman padat di Kampung Pajeksan dan Jogonegaran (di Kota Yogyakarta).

2. Manfaat Penelitian

Secara teoretis, temuan pengetahuan lokal yang sangat spesifik ini, diharapkan memberi sumbangan pada khazanah teori ruang dalam konteks ilmu arsitektur, khususnya ambang batas toleransi keruangan pada hunian dengan lahan terbatas, pada permukiman padat di pusat kota.

Secara praktis memberi manfaat bagi pemberi kebijakan khususnya para pengelola kota, dalam hal penyusunan detail tata ruang kota, sampai penyusunan *guidelines*. Sering kali penyusunan detail ruang kota tidak

sampai pada penetapan yang menyentuh detail penataan ruang hunian di perkampungan padat pada kawasan pusat kota.

1.2.3. Keaslian Penelitian

Berbagai penelitian tentang kampung di Indonesia telah banyak dilakukan. Sebagian besar dilakukan oleh para praktisi dalam kaitannya dengan kebijakan pelaksanaan program perbaikan kampung (KIP) yang telah dimulai sejak tahun 1980-an, antara lain di kota-kota Jakarta, Semarang, Surabaya. Penelitian tentang kampung di sekitar kawasan Malioboro dan penelitian kampung lainnya, telah dilakukan antara lain oleh:

1. Haryadi (1989), gambaran kehidupan sistem seting rumah tinggal di Kampung Ratmakan Yogyakarta, yang terikat erat dengan sistem seting lingkungan urban bahkan lingkungan desa di mana penghuni kampung tersebut berasal. Haryadi dalam penelitiannya menemukan tiga kategori penduduk di Kampung Ratmakan Yogyakarta yaitu: penduduk asli, pendatang, dan temporer. Ketiga kategori penduduk tersebut mempunyai strategi yang berbeda untuk mengatasi tekanan lingkungan. Sistem seting penduduk temporer mempunyai radius atau jangkauan yang lebih luas, meskipun tidak seintensif sistem seting penduduk asli kampung.
2. Atyanto Dharoko (1991), bagaimana membangun kampung, melalui pendekatan yang bertitik tolak dari kapasitas internal masyarakatnya, studi kasus Kampung Sosrowijayan, Yogyakarta.